



LAPORAN KEUANGAN

2024

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL

Jl. Lingkar Timur manding, Tlirenggo,
Bantul

Website : <https://dishub@bantulkab.go.id>

Email : dishub@bantulkab.go.id

Telp : (0274) 367321



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul tahun 2024 ini dengan lancar tanpa hambatan apa pun.

Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul tahun 2023 terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, aset, kewajiban dan ekuitas dana Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul selama 1 (satu) tahun anggaran..

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan ini adalah untuk menyediakan informasi yang relevan dan andal mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul selama tahun 2024, di samping menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik.

Dalam kesempatan ini tidak lupa kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya penyusunan Laporan Keuangan ini. Kami menyadari bahwa Laporan Keuangan ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kritik dan saran sangat kami harapkan demi kesempurnaan penyusunan Laporan Keuangan di tahun – tahun berikutnya.

Demikian Laporan Keuangan ini kami susun semoga dapat dimanfaatkan dengan sebaik – baiknya oleh semua pihak serta dapat mendukung berbagai unsur dalam rangka pengambilan keputusan.

Bantul, 31 Desember 2024

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.....	1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	4
1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan.....	5
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN INDIKATOR CAPAIAN TARGET KINERJA APBD	7
2.1. Ekonomi Makro.....	7
2.2. Kebijakan Keuangan.....	18
2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD:	19
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL	32
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	32
3.2 Hambatan Dan Kendala.....	48
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI	49
4.1. Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah.....	49
4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul	51
4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.....	51
4.2. Penerapan Kebijakan Akuntansi	53
BAB V PENJELASAN POS – POS LAPORAN KEUANGAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL	55
5.1. Rincian dan Penjelasan Masing – Masing Pos Pelaporan Keuangan.....	55
BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN	62
6.1 Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul	62
6.2 Sarana dan Prasarana pendukung	63
6.3 Pencapaian Kinerja Non Keuangan	64
BAB VII PENUTUP	67
LAMPIRAN	68



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PERHUBUNGAN

ꦩꦶꦏꦤꦶꦭꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤꦠꦸꦭ

Jalan Lingkar Timur, Manding, Tlirenggo, Bantul ☎ (0274) 367321
Website: <http://dishub@bantulkab.go.id>, Email: dishub@bantulkab.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul yang terdiri dari :

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Neraca;
- c. Laporan Operasional;
- d. Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Catatan Atas Laporan Keuangan.

Tahun anggaran 2024 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bantul, 31 Desember 2024

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANTUL**



SINGGIH RIYADI, S.E.,M.M
NIP 197307211997031007

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul

Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah dalam hal ini Bupati, telah mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Kabupaten Bantul, salah satunya Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul. Untuk itu di akhir tahun anggaran Bupati meminta Kepala SKPD membuat pertanggungjawaban atas kewenangan yang telah dilaksanakannya.

Bentuk pertanggungjawaban tersebut bukanlah SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) tetapi berupa Laporan Keuangan.

Selama 1 (satu) tahun anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul sebagai entitas akuntansi telah menyelenggarakan sistem akuntansi mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang menjadi kewenangannya dan telah ditetapkan sesuai dengan peraturan daerah. Sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul menyusun Laporan Keuangan, meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebagai pertanggungjawaban Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran, Neraca selaku Pengguna Barang, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) serta Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bantul.

Adapun maksud penyusunan Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul ini adalah :

2. Menyediakan informasi yang relevan dan andal mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul selama satu periode laporan.
3. Untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.
4. Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya – upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada satu periode pelaporan untuk kepentingan :
 - a. Akuntabilitas
Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
 - b. Manajemen
Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul dalam periode laporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana untuk kepentingan masyarakat.
 - c. Transparansi
Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang – undangan.
 - d. Keseimbangan Antar Generasi

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul adalah :

1. Untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam hal ini adalah :
 - pihak – pihak kepada siapa pemerintah bertanggung jawab
 - wakil rakyat dan lembaga pengawas
 - manajemen dan aparat pemerintah
 - pihak yang memberi/berperan dalam proses pemberian bantuan
 - pihak lain yang berkepentingandalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan :
2. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran.
3. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang – undangan.
4. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan serta hasil – hasil yang telah dicapai.
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul berkaitan dengan sumber – sumber penerimaannya.
6. Menyediakan informasi mengenai bagaimana cara mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.

7. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode laporan.
8. Untuk memenuhi tujuan – tujuan tersebut Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, aset, kewajiban dan ekuitas dana Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul selama 1 (satu) tahun anggaran.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul

Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul disusun dengan berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku. Adapun landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan ini adalah :

- a. Undang- Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
- b. Undang- undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang- undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- d. Undang- undang No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
- e. Undang- undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- j. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 5 tahun 2021 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
- l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 72 tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah kabupaten Bantul;
- m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 118 Tahun 2022 tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Perhubungan;
- n. Peraturan Bupati Nomor 81 tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bantul;
- o. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perhubungan TA 2024

1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul

- Bab I Pendahuluan
 - 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul
 - 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul
 - 1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul
- Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD
 - 2.1 Ekonomi Makro
 - 2.2 Kebijakan Keuangan
 - 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja
- Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan.

Bab IV Kebijakan Akuntansi

Bab V Penjelasan Pos – Pos Laporan Keuangan

Bab VI Penjelasan Atas Informasi – Informasi Non Keuangan

Bab VII Penutup

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN
PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

EKONOMI MAKRO

2.1. Ekonomi Makro

Dari tahun ke tahun secara umum kondisi ekonomi masyarakat Indonesia pada umumnya dan Yogyakarta khususnya semakin meningkat, hal ini dapat dilihat dari salah satu indikator, yaitu meningkatnya jumlah kepemilikan kendaraan bermotor. Kondisi ini tentunya membawa konsekuensi terhadap kebutuhan fasilitas pendukung seperti prasarana jalan beserta kelengkapan keselamatan lalu lintasnya.

Kondisi jalan – jalan di Kabupaten Bantul secara bertahap mengalami peningkatan yang signifikan, hal ini terlihat dari kondisi jalan yang ada mayoritas sudah dalam kondisi mantap, namun fasilitas pendukung keselamatan lalu lintas yang tersedia kiranya masih perlu mendapat perhatian. Hal ini terlihat dari jumlah kasus kecelakaan yang terjadi di wilayah Bantul menurut informasi dari Polres Bantul masih cukup tinggi, meskipun mayoritas kasus terjadi karena faktor manusia.

Secara ideal peningkatan jalan seyogyanya diikuti dengan fasilitas lalu lintas yang memadai untuk mendukung keselamatan, keamanan dan kenyamanan lalu lintas seperti LPJU, rambu lalu lintas, marka jalan, APILL, flashing lamp, pagar pengaman jalan, halte dan sebagainya. Pemenuhan terhadap kebutuhan fasilitas tersebut setiap tahun masih terbatas sehingga dari sisi kuantitas dan kualitas prasarana belum memadai.

Sehubungan dengan hal tersebut untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul serta

mewujudkan visi dan misi Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul, disusunlah perencanaan pembangunan secara bertahap dan berkesinambungan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul (Renstra – SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul) tahun 2021 - 2026 sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama 5 (lima) tahun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Bantul Nomor : 06 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

Pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bantul sejak tahun 2021 berpedoman pada RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 06 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 06 tahun 2021.

Sesuai dengan Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul, tujuan dan sasaran pembangunan bidang perhubungan yang hendak dicapai adalah :

1. Tujuan : Mewujudkan keselamatan lalu lintas dengan pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai dan meningkatkan pengetahuan sumber daya manusia dalam berlalu lintas
2. Sasaran : Mewujudkan keselamatan lalu lintas dengan pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai dan meningkatkan pengetahuan sumber daya manusia dalam berlalu lintas

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Perangkat Daerah Dinas
Perhubungan Kabupaen Bantul Tahun 2024:

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terpenuhinya kualitas sarana prasarana publik	Meningkatnya keselamatan lalu lintas	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
		Peningkatan keselamatan transportasi	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
			Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
			Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
			Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
			Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
			Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1(Satu)Daerah Kabupaten/Kota

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Penyediaan Adiministrasi Pelaksanaan Tugas ASN 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1. Monitoring, Evaluasi, dan penilaian Kinerja Pegawai 2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan 6. Fasilitas Kunjungan Tamu 7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 8. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 9. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Bebrbaisi Elektronik pada SKPD
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak, Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dians Operasional atau Lapangan 3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
3.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 2. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)
		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor 2. Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 3. Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 4. Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji 5. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 6. Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 2. Pengadaan, Pemasangan,

			Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas 3. Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 4. Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1. Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1. Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Kebijakan prioritas program pembangunan bidang perhubungan untuk tahun 2024 sesuai Renja 2024 adalah :

Rencana program kegiatan yang tertuang dalam Renja tahun 2023, rencana program kegiatan yang tertuang dalam Renja tahun 2024 menggunakan nomenklatur program/ kegiatan/ subkegiatan sesuai hasil pemetaan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Apabila dilihat dari sisi anggaran, di tahun 2024 mengalami peningkatan anggaran.

Berikut program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta alokasi Anggaran sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024.

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Murni	Perubahan	Tambah/Kurang
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17.000.000	18.125.000	1.125.000
		2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	95.130.000	94.005.000	(1.125.000)
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.984.740.642	6.429.691.289	444.950.647
		2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	103.560.000	103.560.000	0
		3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	28.750.000	28.750.000	0
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1. Monitoring, Evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	11.487.500	12.992.725	(1.505.225)
		2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	51.816.085	51.816.000	(85)
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.300.500	14.140.500	4.840.000
		2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	53.007.045	111.392.245	58.385.200
		3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	25.294.500	25.289.360	(5.140)
		4. Penyediaan Barang Cetak	179.815.235	245.329.344	65.514.109

		dan Penggandaan			
		5. Fasilitas Kunjungan Tamu	20.000.000	15.250.000	4.750.000
		6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	102.833.389	107.001.389	4.168.000
		7. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	15.275.000	15.275.000	0
		8. Dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD	26.000.000	26.000.000	0
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	83.102.668	83.102.668	0
		2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.400.000	8.400.000	(3.000.000)
		3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42.440.000	44.510.000	2.070.000
		4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	372.627.626	380.179.459	7.551.833
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak, Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	107.225.000	107.225.000	0
		2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	344.823.545	361.843.545	17.020.000
		3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan	84.682.142	161.383.000	76.700.858

		Bangunan Lainnya			
PROGRAM PENYELENGGA RAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 2. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	14.075.336.000 2.927.067.950	15.995.336.000 4.223.067.950	1.920.000.000 1.296.000.000
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	1. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	723.415.085	898.415.085	175.000.000
	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1. Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor 2. Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 3. Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 4. Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji 5. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	104.596.000 370.630.448 17.750.000 116.100.000 576.800.000	104.596.000 370.630.448 17.750.000 116.100.000 626.800.000	0 0 0 0 50.000.000

		6. Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	17.403.552	17.403.552	0
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1. Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	242.087.192	245.061.092	2.973.900	
	2. Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	1.620.722.703	1.944.658.803	323.936.100	
	3. Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	55.438.300	252.548.300	197.110.000	
	4. Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	641.683.885	641.683.885	0	
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1. Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	398.047.614	398.047.614	0	

	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1. Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	176.394.000	176.394.000	0
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	19.800.000	19.800.000	0
JUMLAH			29.853.583.606	34.493.554.253	4.639.970.647

Perbandingan program kegiatan dan anggaran antara tahun 2023 dan tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024
Program	3	2
Kegiatan	14	13
Subkegiatan	38	38
Anggaran Murni	29.099.153.169	29.853.583.606
Anggaran Perubahan	33.741.762.969	34.493.554.253

2.2. Kebijakan Keuangan

Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul merupakan bagian dari Pemerintah Kabupaten Bantul yang melaksanakan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik baik secara langsung maupun tidak. Sebagai dukungan, Pemerintah Kabupaten Bantul mengalokasikan dana (anggaran) dan barang/aset sehingga Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang menjadi kewenangannya.

Untuk dapat melaksanakan tupoksi tersebut secara lancar dibutuhkan kebijakan pengelolaan dana (anggaran) yang telah dialokasikan sehingga dapat mencapai target kinerja yang ditetapkan. Kebijakan keuangan yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul pada dasarnya sama dengan kebijakan keuangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul, antara lain :

2.1. Pengelolaan keuangan yang mengacu pada asas umum pengelolaan keuangan, antara lain :

- a. Tertib, efektif, efisien, ekonomis
- b. Taat pada peraturan perundangan yang berlaku
- c. Transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan

2.2. Jumlah yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja

2.3. Semua transaksi keuangan baik penerimaan daerah maupun pengeluaran dicatat, dibukukan, dilaporkan serta dilaksanakan melalui kas daerah.

Untuk tahun 2024 kebijakan keuangan yang ditetapkan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul dapat dilihat dari alokasi anggaran per program kegiatan yang telah disesuaikan dengan prioritas kebutuhan masyarakat.

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul

Indikator pencapaian target kinerja APBD Dinas telah ditetapkan pada saat penyusunan awal program, sehingga dapat digunakan sebagai panduan dalam pelaksanaannya. Penetapan indikator kinerja ini merupakan salah satu tahapan yang harus dilaksanakan dalam rangka pengukuran kinerja. Terdapat beberapa indikator kinerja yang digunakan yaitu indikator masukan (inputs), indikator keluaran (outputs), indikator hasil (outcomes), indikator manfaat (benefits), indikator dampak (impacts).

Penetapan indikator kinerja ini didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Indikator kinerja ini bersifat :

1. Spesifik dan jelas
2. Dapat diukur secara obyektif, baik kuantitatif maupun kualitatif
3. Dapat dicapai, penting dan harus berguna untuk menunjukkan pencapaian keluaran, hasil, manfaat dan dampak.
4. Fleksibel dan sensitif terhadap perubahan
5. Dapat dikumpulkan, diolah dan dianalisis datanya secara efisien dan efektif.

Di samping itu ada beberapa karakteristik indikator kinerja yang baik antara lain :

1. Terikat pada tujuan program dan menggambarkan pencapaian hasil
2. Terbatas pada hal – hal yang vital dan penting bagi pengambilan keputusan
3. Terpusat pada hal – hal yang perlu mendapat prioritas
4. Terkait dengan sistem pertanggungjawaban yang memperhatikan hasil.

Selain penetapan indikator kinerja, pada awal program ditetapkan pula pengukuran kinerja untuk mengetahui efektifitas kinerja yang dihasilkan. Pengukuran kinerja ini digunakan untuk

penilaian atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan, program dan kebijaksanaan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul. Pengukuran kinerja mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja.

Setelah dilakukan pengukuran kinerja, tahapan selanjutnya adalah melaksanakan evaluasi kinerja. Tahapan ini dimulai dengan menghitung nilai capaian dari pelaksanaan kegiatan, kemudian dilanjutkan dengan menghitung nilai capaian kinerja dari pelaksanaan program dan kebijaksanaan didasarkan nilai capaian kinerja kegiatan tersebut. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dilihat dari penyerapan anggaran terhadap kegiatan yang diselesaikan oleh Dinas Perhubungan pada tahun 2024, maka diperoleh hasil **sebesar 97,35%**. Untuk jumlah nilai capaian kebijaksanaan, yang dalam skala pengukuran kinerja termasuk dalam kelompok **sangat berhasil**.

Secara umum pada tahun 2024 program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana. Namun demikian dari sisi anggaran secara keseluruhan masih terdapat sisa anggaran sebesar

Rp. 913.580.919,- (Sembilan Ratus Tiga Belas Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Sembilan Ratus Sembilan Belas Rupiah).

Adapun target pencapaian kinerja data laporan penyelenggaraan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul tahun 2024 adalah sebagai berikut:

**Target Pencapaian Kinerja Data Laporan Penyelenggaraan Program Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul
Tahun 2024**

No	Kegiatan	Sub kegiatan	Anggaran		Realisasi Kegiatan (Out Put)		Capaian Hasil (Out Come)	Ket
			Anggaran	Realisasi				
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18.125.000	18.102.500	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	99,88
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	94.005.000	94.005.000	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	100,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.429.691.289	5.937.802.965	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51 Orang	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	92,35
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	103.560.000	101.960.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	98,46

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	28.750.000	28.749.800	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	5 Laporan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	100,00
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12.992.725	12.887.400	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5 Dokumen	Capaian Kinerja Pengelolaan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	99,19
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	51.816.000	51.816.000	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	Capaian Kinerja Pengelolaan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	100
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.140.500	14.131.510	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	99,94

Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	111.392.245	111.273.500	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	99,89
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	25.289.360	25.078.880	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	19 Paket	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	99,17
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	245.329.344	244.182.200	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	99,53
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.250.000	15.100.000	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	20 Laporan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	99,02
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	107.001.389	106.912.514	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	58 Laporan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	99,92

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	15.275000	15.275000	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	100,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	26.000.000	26.000.000	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	99,04
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	83.102.668	83.092.668	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	99,99
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.400.000	7.721.157	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	91,92
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	44.510.000	44.387.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	99,72

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	380.179.459	373.436.750	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	98,23
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	107.225.000	107.148.851	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD	99,93
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	361.843.545	361.829.763	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD	100
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	161.383000	160.035.600	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD	99,17

	Daerah							
7	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	15.995.336.000	15.651.350.714	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	913 Unit	Persentase ketersediaan perlengkapan jalan yang memadai	97,85
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	4.223.067.950	4.192.451.836	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	3.216 Unit	Persentase ketersediaan perlengkapan jalan yang memadai	99,28
8	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	898.415.085	893.415.085	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	4 Unit	Persentase Tersedianya Fasilitas Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe- C	99,47

9	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	104.596.000	104.525.000	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	10.584 Unit	Persentase kendaraan bermotor wajib uji yang melaksanakan uji kendaraan bermotor	99,93
	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	370.630.448	370.193.448	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	10.000 Dokumen	Persentase kendaraan bermotor wajib uji yang melaksanakan uji kendaraan bermotor	99,88
	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	17.750.000	17.750.000	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2 Laporan	Persentase kendaraan bermotor wajib uji yang melaksanakan uji kendaraan bermotor	100,00
	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	116.100.000	114.937.900	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	1 Laporan	Persentase kendaraan bermotor wajib uji yang melaksanakan uji kendaraan bermotor	99,00

	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	626.800.000	617.786.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	11 Unit	Persentase kendaraan bermotor wajib uji yang melaksanakan uji kendaraan bermotor	98,56
	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	17.403.552	16.994.000	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	4 Laporan	Persentase kendaraan bermotor wajib uji yang melaksanakan uji kendaraan bermotor	97,65
10	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	245.061.092	243.317.342	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	3 Laporan	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten /Kota	99,29

	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	1.944.658.803	1.932.005.668	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	205 Unit	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten /Kota	99,35
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	252.548.300	250.680.000	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten /Kota	99,26
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	641.683.885	641.331.460	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	4 Laporan	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten /Kota	99,95

11	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	398.047.614	396.202.042	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	3 Laporan	Presentase Angkutan Umum Orang dan/atau Barang yang Layak Jalan dan beroperasi	99,54
12	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	176.394.000	176.324.000	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	Persentase Angkutan umum orang dalam trayek yang beroperasi di Kabupaten Bantul	99,96

13	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Facilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	19.800.000	19.800.000	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Laporan	Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan	100
Jumlah			34.493.554.253	33.579.973.334				97,35%

Mengetahui

Pengguna Anggaran



SINGGIH RIYADI, S.E., M.M.
NIP. 197307211997031007

Bantul, 31 Desember 2024

Pejabat Penatausahaan Keuangan


Mochamad Yenni, S.Kel., M.Si.
NIP. 198309052010011013

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Dinas

Secara umum ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul dapat disampaikan sebagai berikut :

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Program ini terdiri dari 6 (enam) kegiatan, dan 22 (dua puluh dua) sub kegiatan. Kebijakan program, kegiatan, dan subkegiatan ini dimaksudkan untuk mendukung terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul dalam mencapai visi dan misi dinas. Anggaran yang dialokasikan atau dipergunakan untuk pelaksanaan program ini sebesar **Rp. 8.445.261.524,-**(Delapan Milyar Empat Ratus Empat Puluh Lima Juta Dua Ratus Enam Puluh satu Ribu Lima ratus Dua Puluh Empat Rupiah) dan dapat terealisasi sebesar **Rp. 7.940.678.958,-** (Tujuh Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Juta Enam ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah) atau sebesar 94.03%.

Sampai dengan akhir tahun semua kegiatan dalam program ini dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar sehingga capaian kinerja atau target output – out come dapat tercapai.

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan.

Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah ditujukan untuk kegiatan sosialisasi program kegiatan pada renstra Dinas Perhubungan. Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 18.125.000,- (Delapan Belas Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 18.102.500,- (Delapan Belas Juta Seratus dua Ribu Lima Ratus Rupiah) atau 99,88%.

Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ditujukan untuk pembayaran honorarium 3 (tiga) tenaga pembantu Non ASN di Sub bagian Program dan Keuangan. Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 94.005.000,- (Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ribu Rupiah) terealisasi sebesar Rp. 94.005.000,- (Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ribu Rupiah) atau 100%.

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga sub kegiatan) yang terdiri dari:

Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang diperuntukkan untuk pembayaran gaji PNS serta tunjangan kinerja PNS sebanyak 51 Orang. Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 6.429.691.289,- (Enam Milyar Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 5.937.802.965,- (Lima Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Dua Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Rupiah) atau 92,35%.

Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN. Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk pembayaran honor PPK PPTK, bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang guna untuk mendukung kegiatan pelaksanaan kegiatan.

Kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai rencana. Alokasi dana untuk kegiatan ini sebesar Rp. 103.560.000,- (Seratus Tiga Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dan terealisasi Rp 101.960.000,- (Seratus Satu Juta Sembilan Ratus Enampuluh Ribu Rupiah) atau 98,46%

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD ditujukan untuk Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan. Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan anggaran dalam rangka penyusunan dokumen laporan kegiatan

dinas antara lain : RKT, PPS, PKK, Laporan Triwulan, Laporan Keuangan, LPPD, LKPJ dan LAKIP, Laporan Mutasi Barang, Laporan Persediaan.

Kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik, semua laporan tersusun sesuai rencana. Alokasi dana untuk kegiatan ini sebesar Rp. 28.750.000,- (Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan terealisasi Rp. 28.749.800,- (Delapan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupiah) atau 100 %.

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua sub kegiatan) yang terdiri dari:

Kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai, pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan makan minum rapat, fotocopy dan sewa tempat. Anggaran yang dialokasikan Rp. 12.992.725,- (Dua Belas Juta Sembilan ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tujuh dua Puluh Lima Rupiah) dan terealisasi Rp. 12.887.400,- (Dua Belas Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Rupiah) atau 99,19%.

Kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja bidang perhubungan yaitu pelaksanaan bimbingan teknis peningkatan kapasitas pegawai asn dan non asn tahun 2024. Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 51.816.000,- (Lima Puluh Satu Juta Delapan Ratus Enam Belas ribu Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 51.816.000,- (Lima Puluh Satu Juta Delapan Ratus Enam Belas ribu Rupiah) atau 100 %.

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 8 (Delapan) sub kegiatan yang meliputi:

Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor ditukuan untuk pengadaan

belanja alat listrik (Fitting, Kabel, Lampu LED, Lampu TL, Stop kontak).Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 14.140.500,- (Empat Belas Juta Seratus Empat Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp 14.131.510,- (Empat Belas Juta Seratus Tiga Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah) atau 99,94%.

Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ditujukan untuk pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor (alat tulis kantor, kertas, cover, bahan-bahan computer, isi tabung pemadam, karangan bunga, almari dab belanja bahan seragam pdl). Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 111.392.245,- (Seratus Sebelas Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Empat Puluh Lima Rupiah) dan terealisasi sebsar Rp. 111.273.500,- (Seratus Sebelas Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah) atau 99,89 %.

Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga ditujukan untuk pembelian bahan peralatan kebersihan serta tabung gas elpigi. Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 25.289.360,- (Dua Puluh Lima Juta Dua ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 25.078.880,- (Dua Puluh Lima Juta Tujuh Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Delapan PuluhRupiah) atau 99,17%.

Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan ditujukan untuk penggandaan dokumen, Amplop Berkop Dinas, Bend.26, Cetak Banner, Stiker Label Aset, Publikasi Ke Media, jasa iklan dan reklame. Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 245.329.344,- (Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Empat Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 244.182.200,- (Dua Ratus Empat puluh Empat Juta Seratus Delapan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Rupiah) atau 99,53%.

Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu digunakan untuk makan minum jamuan tamu yang dialokasikan sebesar Rp. 15.250.000,- (Lima Belas Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 15.100.000,- (Lima Belas Juta Seratus Ribu Rupiah) atau 99,02 %.

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ditunjukan untuk melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah dan transport survey alat perlengkapan jalan. Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 107.001.389,- (Seratus Tujuh Juta Seribu Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp 106.912.514,- (Seratus Enam Juta Sembilan ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Empat Belas Rupiah) atau 99,92%.

Sub Kegiatan Penatausahaan Arasip Dinasmis pada SKPD ditunjukan untuk melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Kearsipan seperti belanja kertas dan cover, belanja cetak dan rapat koordinasi kearsipan di Dinas Perhubungan. Anggaran Dialokasikan sebesar Rp. 15.275.000,- (Lima Belas Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 15.275.000,- (Lima Belas Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) atau 100 %.

Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD ditunjukan untuk melaksanakan kegiatan belanja cetak dan jasa system informasi. Anggaran dialokasikan sebesar Rp. 26.000.000,- (Dua Puluh Enam Juta Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 26.000.000,- (Dua Puluh Enam Juta Rupiah) atau 100%

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan yang meliputi:

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat ditunjukan untuk pembelian materai dan benda pos, serta pembayaran honorarium tenaga non asn administrasi persuratan. Anggaran yang dialokasikan

sebesar Rp. 83.102.668,- (Delapan Puluuh Tiga Juta Seratus Dua Ribu Enam Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp 83.092.668,- (Delapan Puluh Tiga Juta Sembilan Puluh Dua Ribu Enam Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah) atau 99,99%.

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang ditujukan untuk pembayaran rekening listrik dan telepon 12 bulan. Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 8.400.000,- (Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 7.721.157,- (Tujuh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Ribu Seratus Lima Puluh Tujuh Rupiah) atau 91,92%.

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor ditujukan untuk pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran, Pemeliharaan peralatan kantor, peralatan rumah tangga, pemeliharaan ac, pemeliharaan laptop dan pemeliharaan pc. Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 44.510.000,- (Empat Puluh Empat Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 44.387.000,- (Empat Puluh Empat Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah) atau 99,72%.

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor ditujukan untuk pembayaran jasa tenaga non asn keamanan dan kebersihan, iuran premi asuransi BPJS untuk pegawai non asn, belanja pakaian Teknik dan fotocopy. Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 380.179.459,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Seratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 373.436.750,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) atau 98,23%.

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua sub kegiatan) yaitu:

Sub Kegiatan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas, atau Kendaraan Dinas Jabatan yang ditujukan untuk bahan bakar minyak, pajak kendaraan, Pemeliharaan kendaraan dan suku cadang yang dialokasikan sebesar Rp. 107.225.000,- (Seratus Tujuh Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 107.148.851,- (Seratus Tujuh Juta Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Satu Rupiah) atau 99,93%.

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan yang ditujukan untuk Bahan Bakar Minyak, jasa servis bus, KIR kendaraan, Pajak Kendaraan, Pemeliharaan Kendaraan dan pajak kendaraan. Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 361.843.545,- (Tiga ratus Enam Puluh Satu Juta Delapan Ratus Empat puluh Tiga Lima Ratus Empat Puluh Lima Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 361.829.763,- (Tiga Ratus Enam Puluh Satu Juta Delapan ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah) atau 100 %.

Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya ditujukan untuk rehabilitasi Gedung bangunan kantor, penyediaan jalur untuk difabel dan penyediaan ruang PPID. Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 161.383.000,- (Seratus Enam Puluh Satu Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah) dan terealisasi Rp. 104.525.172,- (Seratus Empat Juta Lima Ratus Dua puluh Lima Ribu Seratus Tujuh Puluh Dua Rupiah) atau 99,17%

PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

Program ini terdiri 7 (tujuh) kegiatan dan 16 (enam belas) sub kegiatan

Kebijakan program, kegiatan, dan subkegiatan ini dimaksudkan untuk mendukung terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul dalam mencapai visi dan misi dinas.

Anggaran yang dialokasikan atau dipergunakan untuk pelaksanaan program ini sebesar Rp 26.048.292.729,- (Dua Puluh Enam Milyar Empat Puluh Delapan Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah) dan dapat terealisasi sebesar Rp. 25.639.294.376,- (Dua Puluh Lima Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Tig Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah) atau sebesar 98.43 %. Sampai dengan akhir tahun semua kegiatan dalam program ini dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar sehingga capaian kinerja atau target output – out come dapat tercapai.

Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua sub kegiatan) yaitu:

Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

Maksud sub kegiatan ini adalah tersedianya perlengkapan jalan yang memadai. Tujuan sub kegiatan ini adalah pembangunan prasarana jalan di jalan kabupaten, penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten. Anggaran ini ditujukan untuk pembayaran jasa tenaga non asn, honorarium pengadaan barang jasa, belanja komponen rambu, penyusunan kebutuhan alat pengendali dan pengamanan lalu lintas, konsultan perencana, pengadaan cermin tikung, modal jaringan listrik, pengadaan LPJU dan konsultan pengawas LPJU. Pagu anggaran sub kegiatan ini dialokasikan sebesar Rp. 15.995.336.000,- (Lima Belas Milyar Sembilan ratus Sembilan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah) dan terealisasi Rp. 15.651.350.714,- (Lima Belas Milyar Enam Ratus Lima Puluh Satu Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Tujuh Ratus Empat Belas Rupiah) atau 97,85%.

Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Pagu anggaran sub kegiatan ini dialokasikan sebesar Rp. 4.223.067.950,- (Empat Milyar Dua Ratus Dua Puluh Tiga Juta Enam

Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah) dan terealisasi Rp. 4.192.451.836,- (Empat Milyar Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh satu Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah) atau 99,28%. Adapun bentuk dan kegiatan yang dilaksanakan berupa: pembayaran jasa tenaga non asn, pengecatan tiang PJU, belanja alat listrik suku cadang, pergantian armature LED ruas jalan parangtritis, pemeliharaan jaringan listrik.

Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C

Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) bertujuan tersedianya simpul transportasi yang memadai guna untuk melayani angkutan orang dalam trayek yang lebih baik. Kegiatan ini meliputi pemeliharaan halte bus yang nyaman bagi pengguna angkutan, rehabilitasi pembangunan gedung terminal, Pengerasan jalan di area terminal, pemeliharaan kamar mandi/wc terminal, pembuatan halte taman di terminal, makan minum rapat, sewa bangunan, pemeliharaan jalan, alat pembersih, alat pendingin, fotocopy, ruang terbuka hijau, drainase, UKL UPL, belanja modal taman dan belanja pagar terminal.

Dinas Perhubungan kab. Bantul memiliki 3 Terminal yang masih beroperasi, yaitu :

1. Terminal Palbapang
2. Terminal Imogiri dan
3. Terminal Parangtritis

Fasilitas publik ini seiring dengan perkembangan kondisi, sangat membutuhkan fasilitasi pemeliharaan dan rehabilitasi atas sarana dan prasarannya. Di Tahun 2024 Dinas Perhubungan Kab. Bantul mengalokasikan fasilitasi pemeliharaan dan rehabilitasi untuk terminal type C di Bantul sebesar Rp. 898.415.085,- (Delapan Ratus sembilan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Lima Belas Ribu Delapan Puluh Lima Rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 893.415.085,- (Delapan Ratus Sembilan Puluh tiga Juta Empat Ratus Lima Belas Ribu Delapan Puluh Lima Rupiah) atau sebesar 99,47%.

Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Maksud dari kegiatan ini adalah terselenggaranya kegiatan Pelayanan Uji Berkala Kendaraan Bermotor untuk kendaraan Wajib Uji Di Kabupaten Bantul sesuai dengan UU no. 22 Tahun 2009. Adapun tujuan dari Pengujian berkala Kendaraan Bermotor adalah :

- Memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan di jalan.
- Mendukung terwujudnya kelestarian lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan di jalan
- Memberikan pelayanan umum pada masyarakat.

Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor terdiri dari 6 (enam) sub kegiatan.

Sub Kegiatan Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor.

Maksud kegiatan ini adalah tersedianya sarana administrasi pendukung kegiatan Uji Berkala Kendaraan Bermotor untuk penyediaan Kartu register kendaraan baru, Mutasi Masuk dan Numpang Uji masuk sebantak, Stiker gesek untuk registrasi nomor Rangka dan nomor Mesin Kendaraan Wajib Uji sebanyak dan Honorarium jasa tenaga non ASN. Indikator keluaran Sub Kegiatan ini adalah jumlah kendaraan wajib uji berkala yang terdaftar. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan di atas adalah sebesar Rp. 104.596.000,- (Seratus Empat Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah) dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 104.525.000,- (Seratus Empat Juta Lima ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) atau sebesar 99,93%

Sub Kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

Maksud kegiatan ini adalah tersedianya sarana dan prasarana Bukti Hasil Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. Indikator keluaran Sub Kegiatan ini adalah jumlah dokumen Bukti Lulus Uji Kendaraan bermotor. Adapaun realisasi bentuk kegiatan ini adalah belanja kartu Smart Card, Bukti Lulus Uji Kendaraan Wajib Uji Berjalan yang terdaftar.

Anggaran yang disediakan untuk kegiatan di atas adalah sebesar Rp. 370.630.448,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribuan Empat Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah) dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 370.193.448,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Seratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah) atau sebesar 99,88%.

Sub Kegiatan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

Adapun Bentuk Kegiatan ini adalah Sosialisasi dengan Peraturan Tentang pengujian Kendaraan Bermotor kepada pengusaha angkutan dan warga masyarakat pengguna layanan uji kendaraan bermotor. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan di atas adalah sebesar Rp. 17.750.000,- (Tujuh Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 17.750.000,- (Tujuh Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) atau sebesar 100%.

Sub Kegiatan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji

Adapun Bentuk Keegiatannya adalah Pendataan Potensi jumlah kendaraan wajib uji di kab. Bantul Indikator keluaran Sub Bagian ini adalah Jumlah Kendaraan yang teridentifikasi dan potensi jumlah kendaraan bermotor Wajib Uji. Bentuk realisasi dari anggaran ini berupa Makan minum petugas penguji, belanja televisi, honor pengadaan barang dan jasa dan taman kendaraan.

Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 116.100.000,- (Seratus Enam Belas Juta Seratus Ribu Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 114.937.900,- (Seratus Empat Belas

Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Rupiah) atau sebesar 99,00 %.

Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. Adapun bentuk kegiatan pada sub kegiatan ini adalah Pemeliharaan Alat Uji kendaraan bermotor sejumlah 11 unit serta Kalibrasi alat uji kendaraan bermotor. Hal ini sangat diperlukan mengingat jumlah wajib uji di Kabupaten Bantul yang cukup banyak sehingga akurasi alat uji perlu dipertahankan. Indikator Keluaran Sub Kegiatan ini adalah Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor yang terpelihara. Selain itu bentuk realisasinya berupa belanja kursi tunggu, kulkas, UPS, gorden, alat pemotong rumput, perabotan kantor, honor pengadaan barang dan jasa, pemeliharaan dan pengembangan aplikasi dan alat penomoran kendaraan bermotor.

Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 626.800.000,- (Enam Ratus Dua Puluh Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dan dapat terealisasi sebesar Rp 617.786.000,- (Enam Ratus Tujuh Belas Juta Tujuh ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah) atau 98,56%.

Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

Adapun bentuk kegiatan ini adalah Rapat Koordinasi Intern maupun Rapat dengan instansi terkait mengenai Permasalahan Pengujian Kendaraan Bermotor. Selain itu realisasinya dalam bentuk pembelian ATK dan bahan computer. Indikator Keluaran Sub Kegiatan ini adalah Jumlah Laporan koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. Kegiatan ini didukung dengan Anggaran sebesar Rp. 17.403.552,- (Tujuh Belas Juta Empat Ratus Tiga Ribu Lima Ratus Lima Puluh Dua Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 16.994.000,- (Enam Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah) atau 97,65 %.

Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

Kegiatan ini terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan.

Sub Kegiatan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota. Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 245.061.092,- (Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Enam Puluh Satu Ribu Sembilan Puluh dua Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 243.317.342,- (Dua Ratus Empat Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tujuh Belas Juta Tiga Ratus Empat Puluh Dua Rupiah) atau 99,29%. Adapun bentuk dan kegiatan yang dilaksanakan berupa: kegiatan Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN), survey lalu lintas, sosialisasi lalu lintas, kegiatan semarak dirgantara. Rekomendasi Andalalin yang dikeluarkan pada tahun 2024 sebanyak 18 (enam) standar teknis.

Sub Kegiatan Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas bertujuan untuk memenuhi kebutuhan akan fasilitas keselamatan lalu lintas berupa: pemeliharaan sparepart apill dan rambu flashing dan pengadaan komponen rambu – rambu. Indikator keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas. Perbaikan APILL dilaksanakan di 12 titik APILL di wilayah Kabupaten Bantul.

Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 1.944.658.803,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Juta Enam Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Tiga Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 1.932.005.668,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Juta Lima Ribu Enam ratus Enam Puluh Delapan Rupiah) atau 99,35%.

Sub Kegiatan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota.

bentuk dan kegiatan yang dilaksanakan berupa: Kegiatan sosialisasi keselamatan lalu lintas sebanyak 5 (lima) kali, kesamaptaan sebanyak 12 kali dan sosialisasi pelajar sebanyak 3 (tiga) kali. Sosialisasi pelajar dilaksanakan di SMA 3 Bantul, SMP Kanisius, SMK Bambanglipuro dengan sasaran siswa 350 siswa. Indikator keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen pelaksanaan uji coba dan sosialisasi pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota.

Pagu anggaran sub kegiatan ini Rp. 252.548.300,- (Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Rupiah) terealisasi Rp. 250.680.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) atau 99,26%.

Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten/kota.

Adapun bentuk dan kegiatan yang dilaksanakan berupa: Kegiatan Pengamanan dan wasdal parkir. Wasdal parkir dilaksanakan untuk parkir Tepi jalan umum dan Parkir Khusus. Adapun jumlah parkir tepi jalan umum Tahun 2024 sebanyak 127 lokasi dan Jumlah parkir khusus Tahun 2024 sebanyak 54 lokasi. Kegiatan PPNS pada Tahun 2024 sebanyak 28 kali, Wasdal parkir dilaksanakan sebanyak 48 kali dan kegiatan pam pengamanan sebanyak 313 kali. Indikator keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah laporan.

pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kabupaten/kota.

Pagu anggaran sub kegiatan ini Rp. 641.683.885,- (Enam Ratus Empat Puluh Satu Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah) dan terealisasi Rp. 641.331.460,- (Enam Ratus Empat Puluh Satu Juta Tiga ratus Tiga Puluh satu Ribu Empat Ratus Enam Puluh Rupiah) atau 99,95%. Untuk realisasi secara fisik mencapai 100% dan realisasi keuangan sebesar 100%. Target Pendapatan Daerah parkir adalah :

a. Parkir Tepi Jalan Umum Target Rp. 278.960.000,-. Realisasi.Rp. 239.445.000,- tercapai (86%).

- b. Parkir Khusus Target Rp. 250.000.000,-. Realisasi Rp. 266.385.000,- , tercapai (106%).

Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota.

Maksud Dari Sub Kegiatan Ini Adalah Tersedianya Simpul Transportasi Yang Memadai Guna Pelayanan Angkutan Orang Dalam Trayek Yang Lebih Baik di Jalan Kabupate/Kota.

Dokumen yang dihasilkan pada kegiatan ini:

1. Dokumen laporan Rampceck;
2. Dokumen laporan Sosialisasi Salud;
3. Laporan Inspeksi Kendaraan Bermotor.

Hasil dari survey tersebut adalah tersedianya data angkutan orang. Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 398.047.614,-(Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Empat Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Empat Belas Rupiah) dan dapat terealisasi sebesar Rp. 396.202.042,-(Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Dua Ratus Dua Ribu Empat Puluh Dua Rupiah) atau 99,54%.

Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Maksud Sub Kegiatan Ini Adalah **Terlaksananya Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Keselamatan Angkutan Jalan**. Tujuan Kegiatan Ini Adalah Tersedianya Sosialisasi Keselamatan Angkutan Jalan. Adapun kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

- a. Memfasilitasi Jasa Tenaga Pembantu Pengumpul Data Bidang Angkutan;

- b. Penyelenggaraan Bantul Creative Expo Tahun 2024;
- c. Kegiatan Sosialisasi Keselematan Lalu Lintas dan Angkutan (SALUD) sebanyak 13 Kali.

Adapun anggaran yang disediakan untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 176.394.000,- (Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah) dan dapat terealisasi sebesar Rp. 176.324.000,- (Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Tiga Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah) atau 99,96%.

Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Maksud Sub Kegiatan Ini Adalah Kegiatan pembinaan yang ditujukan untuk para pengelola kios di terminal Palbapang dan Imogiri yang terdaftar sejumlah 65 Orang dan dilaksanakan selama 5 Kali dalam setahun. Kegiatan ini urgen dilaksanakan, mengingat para pengelola kios di 2 terminal (Palbapang dan Imogiri), menjadi salah satu penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bantul. Hasil dari kegiatan ini meliputi Laporan Fasilitas Perijinan 1 dokumen yaitu laporan pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek.

Adapun anggaran yang disediakan untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 19.800.000,- (Sembilan belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dan dapat terealisasi sebesar Rp. 19.800.000,- (Sembilan belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) atau 100 %.

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dari pagu anggaran yang telah ditetapkan untuk Dinas Perhubungan, sesuai Dokumen DPPA – SKPD tahun 2024 sebesar **Rp. 34.493.554.253,-** (Tiga Puluh Empat Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta

Lima Ratus Lima Puluh Empat Ribu Dua Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah), secara keseluruhan dapat terealisasi sebesar **Rp. 33.579.973.334,-** (Tiga Puluh Tiga Milyar Lima ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah) sehingga terdapat sisa anggaran sebesar **Rp. 913.580.919,-** (Sembilan Ratus Tiga Belas Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Sembilan Ratus Sembilan Belas Juta Rupiah).

3.2 Hambatan Dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Beberapa hambatan dan kendala yang masih sering dihadapi dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan antara lain :

1. Terbatasnya kemampuan SDM. Kualitas SDM di semua bidang masih perlu ditingkatkan agar pelaksanaan tugas yang semakin kompleks teratasi dan selesai tepat pada waktunya, sedangkan dalam hal kuantitas masih sangat diperlukan mengingat volume pekerjaan yang menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul semakin banyak. Guna mendukung pelaksanaan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul masih diperlukan tenaga / personil dengan spesifikasi pendidikan STM Mesin / Listrik, Akademi Lalu Lintas (D3), Sekolah Tinggi Transportasi Darat (D4), D2 Pengujian Kendaraan Bermotor, PPNS Bidang Perhubungan.
2. Kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat dalam berlalu lintas sehingga masih sering terjadi pelanggaran dan kecelakaan.
4. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung operasional seperti mobil operasional yang memadai, sepeda motor, sarana komunikasi, peralatan komputer yang perlu di perbaharui dan perlengkapan keselamatan, menyebabkan kurangnya optimalisasi kinerja dinas.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul merupakan salah satu SKPD di Kabupaten Bantul yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan wajib di bidang perhubungan.

Sedangkan tugas pokok dan uraian tugas secara dirinci diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 118 Tahun 2022 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul. Sementara landasan operasional lain yang digunakan dalam pelaksanaan tugas tugas teknis antara lain Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan urusan Perhubungan, Peraturan Menteri Perhubungan, SK Dirjen dan sebagainya.

Berdasarkan Permendagri nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri nomor 21 tahun 2012 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan entitas akuntansi adalah SKPD sedangkan yang disebut entitas pelaporan adalah SKPKD. Penyebutan SKPD selaku entitas akuntansi (*accounting entity*) pada dasarnya menunjukkan bahwa SKPD melaksanakan proses akuntansi untuk menyusun laporan keuangan yang akan disampaikan kepada kepala daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah yang mencakup anggaran dan barang, diiringi dengan dana yang dikelola.

Sementara itu dalam UU nomor 1 tahun 2004 dijelaskan bahwa SKPD merupakan entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan yang nantinya akan digabungkan dengan entitas pelaporan.

Dengan demikian Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul selaku entitas akuntansi mempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan Keuangan. Laporan Keuangan yang telah disusun oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul adalah :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
Merupakan laporan yang menyajikan informasi tentang anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul yang terdiri dari pendapatan dan belanja serta realisasinya. Informasi ini dapat dianalisis dengan melihat selisih antara anggaran dan realisasinya atau melihat rasio – rasio antar rekening, misalnya rasio total belanja terhadap total pendapatan, belanja langsung terhadap belanja tidak langsung, belanja langsung terhadap total pendapatan dsb.
2. Laporan Operasional (LO)
Merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode.
3. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
Merupakan laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
4. Neraca
Merupakan laporan yang memberikan informasi mengenai kondisi atau posisi keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul pada akhir tahun anggaran mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana.
5. CALK (Catatan Atas Laporan Keuangan)
Laporan ini memberikan informasi mengenai berbagai hal yang tidak terbaca dari LRA, LO, LPE, dan Neraca. Laporan ini berisi

penjelasan naratif, analisis atau daftar terinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Laporan ini juga menjelaskan berbagai kebijakan, pendekatan, metode dan dasar penentuan dan penyajian angka – angka LRA dan Neraca di samping juga menjelaskan berbagai faktor, asumsi dan kondisi yang mempengaruhi angka – angka dalam Laporan Keuangan.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 81 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bantul. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul adalah : basis akrual.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos – pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Basis pengukuran atas penyusunan pos – pos laporan keuangan adalah :

1. Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Dinas. Kas di bendahara pengeluaran merupakan kas yang menjadi tanggung jawab / dikelola oleh bendahara pengeluaran berupa sisa UP / TU yang per tanggal neraca belum disetor ke kas daerah. Kas di bendahara penerimaan merupakan saldo penerimaan yang bersumber dari pelaksanaan tugas bendahara tersebut (saldo pungutan yang diterima) yang per tanggal neraca belum disetor ke kas daerah.

2. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang – barang yang dimaksudkan untuk dijual dan / atau diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat dalam waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal pelaporan. Persediaan dicatat pada akhir tahun periode akuntansi dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan (physical inventory taking). Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikan dan / atau pengurangannya berpindah dan dinilai dalam neraca dengan cara :

- a. biaya perolehan terakhir apabila diperoleh dengan pembelian;
- b. harga / nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

3. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Aset tetap berwujud harus memenuhi kriteria :

- mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal;
- tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Klasifikasi aset tetap yang digunakan dalam laporan keuangan ini adalah Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya. Aset tetap diakui pada saat diterima dan kepemilikan berpindah serta dinyatakan dalam neraca dengan harga perolehan atau harga perolehan yang diestimasi.

4. Ekuitas Dana

Ekuitas dana adalah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara aset dengan kewajiban yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar (EDL)

dan Ekuitas Dana Investasi (EDI).

EDL : selisih antara jumlah nilai aset lancar dengan jumlah nilai kewajiban jangka pendek

EDI : kekayaan yang tertanam dalam investasi jangka panjang dan aset lainnya dikurangi jumlah kewajiban jangka panjang.

5. Pendapatan

Pendapatan daerah adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah Ekuitas Dana Lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali

6. Belanja

Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas daerah yang mengurangi Ekuitas Dana Lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi beban daerah. Pengakuan biaya diakui pada saat terjadi pengeluaran dan diukur sebesar kas yang dikeluarkan.

4.2. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul sebagai entitas akuntansi telah menyelenggarakan sistem akuntansi mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang menjadi kewenangannya dan telah ditetapkan sesuai dengan peraturan daerah.

Sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul menyusun Laporan Keuangan, meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebagai pertanggungjawaban Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca

selaku Pengguna Barang serta Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) yang disusun dan disajikan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bantul.

Namun demikian penerapan kebijakan akuntansi yang dilaksanakan belum sepenuhnya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan terutama menyangkut penilaian aset tetap yang belum sepenuhnya didasarkan pada biaya perolehan atau nilai wajar pada saat perolehan serta belum dilakukannya penyusutan terhadap aset tetap.

BAB V
PENJELASAN POS – POS LAPORAN KEUANGAN
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL

5.1. Rincian dan Penjelasan Masing – Masing Pos Pelaporan Keuangan

1. Pendapatan

Di samping mengelola belanja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul juga melaksanakan tugas sebagai dinas penghasil PAD. Beberapa retribusi yang menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul antara lain Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, Retribusi Perijinan Tertentu dan Lain lain pendapatan yang sah. Adapun realisasi yang diperoleh dari masing – masing jenis retribusi dapat dijelaskan sebagai berikut :

Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Perkembangan jumlah penduduk dan meningkatnya kepemilikan kendaraan bersamaan dengan kegiatan masyarakat yang semakin kompleks akan menimbulkan permasalahan tersendiri bagi lalu lintas yang ada di sekitarnya.

Penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum pertama – tama dimaksudkan sebagai fasilitas pendukung untuk menjamin tercapainya keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas, selain itu juga telah membuka peluang bagi warga masyarakat untuk bergerak dalam perekonomian usaha jasa.

Pemerintah Daerah dalam menjalankan fungsi regulasi bagi penyelenggaraan tempat parkir sebagai kegiatan pelayanan umum akan menimbulkan beban biaya penyediaan jasa penyelenggaraan parkir yang semakin meningkat sehingga perlu diupayakan meningkatkan partisipasi masyarakat sebagai pengguna jasa parkir.

Sehubungan dengan hal tersebut perlu adanya peraturan yang mengatur tentang penyelenggaraan parkir beserta retribusinya, dalam hal ini retribusi parkir di tepi jalan umum. Retribusi parkir di tepi jalan umum adalah retribusi yang dipungut kepada wajib retribusi yang menyelenggarakan parkir dengan menggunakan badan jalan. Pembayaran atas penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dasar pemungutan retribusi ini adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 06 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mencabut Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2011 tentang Retribusi jasa Umum. Adapun target pendapatan dari retribusi parkir di tepi jalan umum untuk tahun 2024 sebesar Rp. 278.960.000,- (Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah). Sampai dengan akhir tahun dapat terealisasi sebesar Rp. 291.670.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh satu Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) atau sebesar 105%.

Retribusi pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha (Terminal Palbapang dan Terminal Imogiri)

Retribusi pemakaian kios adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat kegiatan usaha, tempat kegiatan usaha fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pemungutan Retribusi pemakaian kios di Kabupaten Bantul diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 06 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mencabut Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2011 tentang Retribusi jasa Umum.

Adapun target pendapatan retribusi kios terminal pada tahun 2024 adalah sebesar Rp. 187.173.000,- (Seratus Delapan Puluh Tujuh Juta Seratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah).

Sampai dengan akhir Desember 2024 dapat terealisasi sebesar Rp. 207.895.000,- (Dua ratus Tujuh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah) atau sebesar 110%.

Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir

Retribusi Tempat Khusus Parkir Perkembangan jumlah penduduk dan meningkatnya kepemilikan kendaraan bersamaan dengan kegiatan masyarakat yang semakin kompleks akan menimbulkan permasalahan. Salah satunya adalah terpenuhinya ruang parkir yang berada di tempat diselenggarakannya kegiatan pelayanan publik.

Penyediaan tempat khusus parkir merupakan pelayanan yang menggunakan atau memanfaatkan kekayaan daerah berupa tanah atau bangunan. Dengan adanya keterbatasan Pemerintah Daerah dalam menyediakan pelayanan ini maka pihak swasta dapat dilibatkan dalam pengelolaannya dengan menganut prinsip – prinsip komersial.

Dalam rangka menjalankan fungsi regulasi dan optimalisasi pemanfaatan kekayaan daerah yang dipakai tempat khusus parkir sebagai kegiatan pelayanan umum, ditempuh dengan meningkatkan peran partisipasi masyarakat pengguna jasa parkir. Sehubungan dengan hal tersebut perlu adanya peraturan yang mengatur tentang penyelenggaraan parkir beserta retribusinya, dalam hal ini retribusi tempat khusus parkir.

Retribusi tempat khusus parkir adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh Perusahaan Daerah dan pihak swasta.

Adapun target pendapatan dari retribusi parkir Khusus untuk tahun 2024 sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah). Sampai dengan akhir tahun dapat terealisasi sebesar Rp. 321.625.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) atau 122 %.

Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor (Bus)

Adapun target pendapatan dari retribusi pemakaian kendaraan Bermotor (BUS) untuk tahun 2024 Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) sampai dengan akhir tahun dapat direalisasikan sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) atau 40 %

Berikut disajikan secara ringkas mengenai target dan realisasi pendapatan dari masing – masing jenis retribusi di atas.

Jenis Retribusi	Target	Realisasi	%
Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	278.960.000	291.670.000	105
Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	5.000.000	2.000.000	40
Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Usaha di Terminal Imogiri dan Palbapang	187.173.000	207.895.000	110
Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	250.000.000	321.625.000	122
Jumlah	471.383.000	531.811.670	111,36

2. Belanja

Pada tahun 2024 Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul memperoleh alokasi anggaran sebesar **Rp. 34.493.554.253,-** (Tiga Puluh Empat Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Lima ratus Lima Puluh Empat Ribu Dua Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah).

Secara keseluruhan dapat terealisasi sebesar **Rp. 33.579.973.334** (Tiga Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

2.1 Belanja Operasi

Pada tahun 2024 alokasi anggaran untuk belanja operasi sebesar Rp. 18.378.992.263,- (Delapan belas milyar tiga

ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus enam puluh tiga Rupiah) dan dapat terealisasi sebesar Rp. 17.807.825.181,- (Tujuh Belas Milyar Delapan Ratus Tujuh Juta Delapan ratus Dua Puluh Lima Ribu Seratus Delapan Puluh Satu Rupiah) atau 96,89%.

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi
1	Belanja Pegawai	6.562.266.289	6.065.002.965
2	Belanja Barang dan Jasa	11.816.725.974	11.742.822.216
Jumlah		18.378.992.263	17.807.825.181

2.2 Belanja Modal

Pada tahun 2024 alokasi anggaran untuk belanja modal sebesar Rp. 16.114.561.990,- (Enam Belas Milyar Seratus Empat belas Juta Lima Ratus Enam Puluh satu Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Rupiah).

Sampai dengan akhir tahun terealisasi sebesar Rp. 15.772.151.467,- (Lima Belas Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Seratus Lima Puluh Satu Ribu Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah) atau 97,88%.

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.010.666.500	1.003.387.500
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	310.050.000	308.662.477
3	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	14.793.845.490	14.460.101.490
Jumlah		16.114.561.990	15.772.151.467

Dari keseluruhan belanja modal tersebut menghasilkan aset tetap sebesar Rp. 16.114.561.990,- (Enam Belas Milyar Seratus Empat Belas Juta Lima Ratus Enam Puluh Satu

Sembilan ratus Sembilan Puluh Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Peralatan dan Mesin : Rp. 1.010.666.500,-
- b. Jalan, Irigasi dan Jaringan : Rp. 18.523.153.200,-
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan : Rp. 310.050.000,-

3. Aset

Jumlah keseluruhan aset baik aset lancar maupun aset tetap per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

a. Aset Lancar

Aset lancar terdiri dari Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan dan Persediaan. Sampai dengan akhir tahun anggaran 2024 baik Kas di Bendahara Pengeluaran maupun Kas di Bendahara Penerimaan **tidak ada sisa kas**.

Sedangkan untuk persediaan terdapat sisa persediaan sebesar Rp. 1.368.475.172 (Satu Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Seratus Tujuh Puluh Dua Rupiah).

b. Aset Tetap

Sampai dengan akhir tahun 2024 terdapat tambahan aset tetap dari hasil dropping dari PPKD kabupaten Bantul. Aset tetap yang berasal dari hibah dari PPKD Kabupaten Bantul (ESDM) sebesar Rp. 1.908.270.576,- (Satu Milyar Sembilan ratus Delapan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah) dan Hibah Kementerian Rp 636.757.817 (Enam Ratus Tiga Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Delapan ratus Tujuh Belas Rupiah) yaitu terdiri dari :

- 1. LPJU Solar Cell Rp 2.545.028.393

Jumlah Aset yang dihapus tahun 2024 sebesar Rp 554.500.166,- (Lima Ratus Lima Puluh Empat Juta Lima ratus Ribu Seratus Enam Puluh enam Rupiah) yang terdiri dari:

- 1. Peralatan dan Mesin Rp 377.710.166
- 2. Gedung dan Bangunan Rp 176.790.000

Total Aset tahun 2024 sebesar Rp. 213.892.596.508,- (Dua Ratus Tiga Belas Milyar Delapan ratus Sembilan Puluh Dua Juta Lima ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Lima ratus Delapan Rupiah) terdiri dari :

1. Tanah	Rp	4.025.200.000,-
2. Peralatan dan Mesin	Rp.	28.370.759.259,-
3. Gedung dan Bangunan	Rp.	14.990.496.497,-
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp.	162.305.573.610,-
5. Aset Tetap lainnya	Rp.	2.816.767.253,-
6. Aset Lainnya (ATB)	Rp.	1.383.799.890,-

BAB VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul

Susunan organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul mengubah sebagian Peraturan Daerah nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
3. Bidang Angkutan
4. Bidang Lalu Lintas
5. Bidang Perlengkapan Jalan
6. UPT Pengujian Kendaraan Bermotor
7. Kelompok Jabatan Fungsional

a. Sarana dan Pendukung Kegiatan Administrasi dan Operasional

Pendukung Kegiatan Administrasi

Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 berjumlah 44 (empat puluh Empat) orang

Menurut kualifikasi pendidikan :

SD	:	1
SLTA/ SMK	:	21
D2	:	4
D3	:	5
D4	:	2
S1	:	5
S2	:	7

Sedangkan menurut Eselon adalah :

Eselon II B	:	1
Eselon III A	:	1
Eselon III B	:	2
Eselon IV A	:	10

Staff : 30

6.2 Sarana dan Prasarana pendukung kegiatan operasional Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul

Untuk melaksanakan kegiatan dinas utamanya kegiatan operasional dan untuk mencapai target kinerja yang optimal dibutuhkan dukungan sarana dan prasarana. Jumlah dan kondisi sarana dan prasarana pendukung kegiatan operasional Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul per 31 Desember 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Mobil operasional tertutup	:	6
Mobil operasional terbuka	:	4
Sepeda motor operasional	:	17
Sepeda motor patwal	:	4
Bus	:	3
Truk LPJU	:	2
Kamera	:	9
LCD	:	5
Laptop	:	29
Komputer	:	31
HT	:	50
Sepeda	:	4
Printer	:	44
AC	:	29
Genset	:	1
Kipas Angin	:	13
GPS	:	2
Kulkas	:	3
Mesin Fax	:	2
Mesin Fotocopy	:	1
Mesin ketik	:	2
Mesin las	:	1
Felt Bed	:	10
Alat Uji Emisi Bensin	:	2
Alat Uji Emisi Solar	:	2
Alat Timbang Portable	:	1

Deselometer	:	1
Megaphone	:	2
Speaker Aktif	:	2
Vacum Cleaner	:	2
Laser Distance Meter	:	1
Tenda Gazebo	:	10
Kursi Tamu	:	12
Kursi Putar Staf	:	50
Kursi Struktural Eselon III	:	3
Kursi Eselon IV	:	8
Kursi Pimpinan	:	1
Kursi Tunggu	:	8
Kursi Rapat	:	89
CCTV	:	2
Alat Pengangkat	:	1
Brake Tester	:	1
Kompressor	:	1
Dispenser	:	2
Rak Arsip	:	6
Tablet	:	1
Filling Cabinet	:	11
Finger Print	:	3
Televisi	:	4
Tabung APAR	:	4

6.3 Pencapaian Kinerja Non Keuangan

Beberapa pencapaian kinerja non keuangan yang dicapai Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul di tahun 2024 antara lain :

a. Program peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian

Kegiatan ini merupakan kegiatan penunjang yang dilaksanakan rutin setiap tahun. Kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan tidak ada kendala yang berarti. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

1. Penyusunan daftar nominatif pegawai;
2. Penyusunan DUK (Daftar Urut Kepangkatan);

3. Pengusulan kenaikan pangkat pegawai;
 4. Pembuatan kenaikan gaji berkala pegawai;
 5. Pengusulan pensiun pegawai;
 6. Pembuatan cuti pegawai;
 7. Penyusunan Anjab, ABK, SKP.
- b. Peningkatan Sumber Daya Manusia dengan pengiriman diklat dan pelatihan teknik/Bimbingan teknis.
- Kegiatan ini merupakan kegiatan penunjang pelaksanaan tugas yang sangat penting karena bagaimana pun beratnya apabila didukung oleh sumber daya manusia yang memadai dan profesional akan menjadi terasa lebih ringan. Diklat yang diikuti tidak hanya diklat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dengan biaya APBD tetapi juga diklat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementrian Perhubungan dengan biaya APBN.
- c. Penyelenggaraan pelayanan administrasi perkantoran.
- Kegiatan ini berjalan dengan baik dengan adanya pelaksanaan administrasi persuratan dan pelaporan secara tertib dan tepat waktu.
- d. Penyusunan rencana program kegiatan untuk tahun 2025.
- Kegiatan ini berjalan lancar. Rencana dapat disusun tepat waktu baik untuk anggaran rutin maupun pendapatan. Rencana telah disetujui DPR untuk dilaksanakan tahun 2025.
- e. Penyusunan RKBMD dan RKPBMMD tahun 2025.
- Kegiatan ini berjalan dengan lancar. Penyusunan RKBMD dan RKPBMMD tahun 2025 dilaksanakan bersamaan dengan penyusunan RKA tahun 2025.
- f. Wasdal penyelenggaraan perparkiran di Kabupaten Bantul.
- Kegiatan ini berjalan dengan lancar sampai akhir tahun 2024. Telah diadakan pertemuan / sambung rasa dengan petugas parkir di seluruh Kabupaten Bantul baik parkir tepi jalan umum maupun parkir di tempat khusus parkir, dan telah dibentuk paguyuban petugas parkir. Sampai dengan akhir tahun telah dilaksanakan kegiatan wasdal sebanyak 48 (Seratus Empat Puluh Empat) kali.

g. Pelayanan perijinan bidang perhubungan.

Kegiatan ini berjalan dengan baik tanpa ada kendala yang berarti sampai dengan akhir tahun. Perijinan yang dilayani antara lain perijinan penyelenggaraan perparkiran yang sampai dengan akhir tahun telah dikeluarkan sebanyak 181 (seratus Delapan Puluh satu) ijin parkir terdiri dari 127 (seratus Dua Puluh tujuh) ijin parkir tepi jalan umum dan 54 (lima puluh empat) ijin parkir khusus.

BAB VII
PENUTUP

Demikian secara keseluruhan Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul yang dapat kami sajikan. Tentunya dalam penyusunannya tidak lepas dari kekurangan, untuk itu saran dan masukan sangat kami harapkan demi kesempurnaan penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) untuk tahun - tahun berikutnya. Secara ringkas berikut kami sajikan perbandingan kondisi Tahun 2023 dan 2024 sbb:

	2023	2024
Pagu anggaran	Murni : 29.099.153.169 Penambahan : 4.642.609.800 Jumlah : 33.741.762.969	Murni : 29.853.583.606 Penambahan : 4.639.970.647 Jumlah : 34.493.554.253
Rincian belanja	Operasi : 14.555.147.455 Modal : 19.186.615.514	Operasi : 18.378.992.263 Modal : 16.114.561.990
Komposisi program kegiatan dan penggunaan anggaran	Program : 3 program Kegiatan : 14 kegiatan Sub Kegiatan : 38 sub kegiatan Pelaksana : Sekretariat, Bidang Lalu Lintas, Bidang Perlengkapan Jalan, Bidang Angkutan	Program : 2 program Kegiatan : 13 kegiatan Sub Kegiatan : 38 sub kegiatan Pelaksana : Sekretariat, Bidang Lalu Lintas, Bidang Perlengkapan Jalan, Bidang Angkutan
Personil	PNS : 46 orang PHL : 73 orang	PNS : 44 orang PHL : 73 orang

Bantul, 31 Desember 2024

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL



LAMPIRAN

1. Neraca TA. 2024
2. Laproan Realisasi Anggaran (LRA) TA. 2024
3. Laporan Operasional (LO) TA. 2024
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) TA. 2024



PEMERINTAHAN KAB. BANTUL

DINAS PERHUBUNGAN

Neraca

TAHUN ANGGARAN 2024

1 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024



Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	2024	2023
1	ASET	156.294.447.834,09	143.439.888.006,39
1.1	ASET LANCAR	1.386.826.422,00	427.778.505,00
1.1.04	Piutang Retribusi Daerah	169.290.500,00	169.290.500,00
1.1.04.01	Piutang Retribusi Jasa Umum	88.090.500,00	88.090.500,00
1.1.04.02	Piutang Retribusi Jasa Usaha	80.500.000,00	80.500.000,00
1.1.04.03	Piutang Retribusi Perizinan Tertentu	700.000,00	700.000,00
1.1.10	Penyisihan Piutang	(169.290.500,00)	(169.290.500,00)
1.1.10.01	Penyisihan Piutang Pendapatan	(169.290.500,00)	(169.290.500,00)
1.1.11	Beban Dibayar Dimuka	18.351.250,00	16.281.250,00
1.1.11.01	Beban Dibayar Dimuka	18.351.250,00	16.281.250,00
1.1.12	Persediaan	1.368.475.172,00	411.497.255,00
1.1.12.01	Barang Pakai Habis	1.368.475.172,00	411.497.255,00
	JUMLAH ASET LANCAR	1.386.826.422,00	427.778.505,00
		0,00	0,00
1.3	ASET TETAP	154.293.751.460,09	142.555.548.261,39
1.3.01	Tanah	4.025.200.000,00	4.025.200.000,00
1.3.01.01	Tanah	4.025.200.000,00	4.025.200.000,00
1.3.02	Peralatan dan Mesin	27.971.264.582,13	27.041.027.848,81
1.3.02.01	Alat Besar	1.200.000,00	1.200.000,00
1.3.02.02	Alat Angkutan	5.256.870.450,97	5.255.138.950,99
1.3.02.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	3.094.451.786,00	2.688.688.786,00
1.3.02.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.491.919.679,98	2.264.161.179,98
1.3.02.06	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	351.072.128,34	351.072.128,33
1.3.02.09	Alat Persenjataan	215.535.999,95	213.135.999,95
1.3.02.10	Komputer	720.508.160,00	689.638.160,00
1.3.02.15	Alat Keselamatan Kerja	43.891.800,00	30.711.800,00
1.3.02.18	Rambu-rambu	15.795.814.576,89	15.547.280.843,56
1.3.03	Gedung dan Bangunan	14.990.496.497,00	13.313.765.620,00
1.3.03.01	Bangunan Gedung	14.422.889.987,00	12.746.159.110,00
1.3.03.03	Bangunan Menara	68.750.000,00	68.750.000,00
1.3.03.04	Tugu Titik Kontrol/Pasti	498.856.510,00	498.856.510,00
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	162.305.573.610,08	147.103.141.303,07
1.3.04.01	Jalan dan Jembatan	528.605.855,36	528.605.855,36
1.3.04.02	Bangunan Air	105.574.000,00	0,00
1.3.04.04	Jaringan	161.671.393.754,72	146.574.535.447,71
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	2.816.767.252,32	2.816.767.252,32
1.3.05.01	Bahan Perpustakaan	2.816.767.252,32	2.816.767.252,32

Kode Rekening	Uraian	2024	2023
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(57.815.550.481,44)	(51.744.353.762,81)
1.3.07.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(24.223.249.529,44)	(22.468.383.512,91)
1.3.07.02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(2.300.362.577,92)	(2.080.788.749,98)
1.3.07.03	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(31.291.938.374,08)	(27.195.181.499,92)
	JUMLAH ASET TETAP	154.293.751.460,09	142.555.548.261,39
		0,00	0,00
1.5	ASET LAINNYA	613.869.952,00	456.561.240,00
1.5.03	Aset Tidak Berwujud	1.383.799.890,00	1.021.377.800,00
1.5.03.01	Aset Tidak Berwujud	1.383.799.890,00	1.021.377.800,00
1.5.05	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(769.929.938,00)	(564.816.560,00)
1.5.05.01	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(769.929.938,00)	(564.816.560,00)
	JUMLAH ASET LAINNYA	613.869.952,00	456.561.240,00
	JUMLAH ASET	156.294.447.834,09	143.439.888.006,39
		0,00	0,00
2	KEWAJIBAN	596.505,00	3.695.853,00
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	596.505,00	3.695.853,00
2.1.06	Utang Belanja	596.505,00	3.695.853,00
2.1.06.02	Utang Belanja Barang dan Jasa	596.505,00	3.695.853,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	596.505,00	3.695.853,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	596.505,00	3.695.853,00
		0,00	0,00
3	EKUITAS	156.293.851.329,09	143.436.192.153,39
3.1	EKUITAS	156.293.851.329,09	143.436.192.153,39
3.1.01	Ekuitas	123.536.867.995,09	114.452.124.782,72
3.1.01.01	Ekuitas	147.402.996.773,07	128.212.457.617,39
3.1.01.02	Surplus/Defisit-LO	(23.866.128.777,98)	(13.760.332.834,67)
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	32.756.983.334,00	28.984.067.370,67
3.1.03.01	RK PPKD	32.756.983.334,00	28.984.067.370,67
	JUMLAH EKUITAS	156.293.851.329,09	143.436.192.153,39
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	156.294.447.834,09	143.439.888.006,39

Kode Rekening	Uraian	2024	2023
---------------	--------	------	------

Kab. Bantul, 31-01-2025
Kepala Dinas Perhubungan



Singgih Riyadi, S.E, M.M.
NIP. 197307211997031007

Dicetak Oleh SIPD Kementerian Dalam Negeri



PEMERINTAHAN KAB. BANTUL

DINAS PERHUBUNGAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024

01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	728.633.000,00	822.990.000,00	112,95	1.689.879.440,00
4.1.02	Retribusi Daerah	721.133.000,00	822.990.000,00	114,12	1.681.015.700,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	278.960.000,00	303.605.000,00	108,83	1.176.163.000,00
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	278.960.000,00	303.605.000,00	108,83	265.455.000,00
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	910.708.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	442.173.000,00	519.385.000,00	117,46	504.852.700,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.400.000,00	2.000.000,00	142,86	5.800.000,00
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	79.260.000,00	208.570.000,00	263,15	231.057.700,00
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	250.000.000,00	308.815.000,00	123,53	267.995.000,00
4.1.02.02.20	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	111.513.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	7.500.000,00	0,00	0,00	8.863.740,00
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	7.500.000,00	0,00	0,00	8.863.740,00
4.1.04.13.01	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	7.500.000,00	0,00	0,00	8.863.740,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	728.633.000,00	822.990.000,00	112,95	1.689.879.440,00
	JUMLAH PENDAPATAN	728.633.000,00	822.990.000,00	112,95	1.689.879.440,00
5	BELANJA DAERAH	34.493.554.253,00	33.579.973.334,00	97,35	33.162.180.008,00
5.1	BELANJA OPERASI	18.378.992.263,00	17.807.821.867,00	96,89	14.331.518.528,00
5.1.01	Belanja Pegawai	6.562.266.289,00	6.065.002.965,00	92,42	5.722.620.775,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.465.691.289,00	3.168.211.421,00	91,42	3.074.654.637,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	2.426.232.767,00	2.317.744.202,00	95,53	2.256.326.000,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	259.671.278,00	237.671.716,00	91,53	225.906.528,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	158.330.000,00	155.190.000,00	98,02	142.100.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	64.490.000,00	41.060.000,00	63,67	38.265.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	109.807.000,00	53.490.000,00	48,71	66.305.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	167.797.140,00	133.180.380,00	79,37	138.394.620,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	53.444.969,00	23.697.623,00	44,34	10.129.632,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	84.918,00	30.210,00	35,58	29.922,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	202.176.974,00	187.086.470,00	92,54	178.638.778,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	5.914.061,00	4.765.195,00	80,57	4.639.759,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	17.742.182,00	14.295.625,00	80,57	13.919.398,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.964.000.000,00	2.769.591.544,00	93,44	2.524.006.138,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban Kerja ASN	910.000.000,00	824.268.845,00	90,58	0,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	2.054.000.000,00	1.945.322.699,00	94,71	2.524.006.138,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	132.575.000,00	127.200.000,00	95,95	123.960.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	124.775.000,00	119.400.000,00	95,69	123.960.000,00
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	7.800.000,00	7.800.000,00	100,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.816.725.974,00	11.742.818.902,00	99,37	8.608.897.753,00
5.1.02.01	Belanja Barang	5.997.263.973,00	5.957.956.222,00	99,34	3.525.150.295,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	4.412.928.973,00	4.383.217.622,00	99,33	2.196.494.245,00
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	1.455.795.000,00	1.446.298.600,00	99,35	1.328.656.050,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	128.540.000,00	128.440.000,00	99,92	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	3.833.650.650,00	3.807.402.307,00	99,32	3.508.256.197,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2.961.232.464,00	2.948.717.789,00	99,58	2.614.200.549,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	107.150.000,00	100.407.414,00	93,71	91.553.109,00
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	73.338.186,00	73.336.486,00	100,00	35.678.739,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	28.580.000,00	28.580.000,00	100,00	59.080.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	181.175.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	0,00	0,00	0,00	35.500.000,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	600.000.000,00	593.010.618,00	98,84	490.068.800,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	51.350.000,00	51.350.000,00	100,00	1.000.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	1.877.761.351,00	1.869.472.859,00	99,56	1.247.273.621,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	521.110.000,00	519.844.614,00	99,76	234.402.187,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	148.072.004,00	147.107.400,00	99,35	344.856.356,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.208.579.347,00	1.202.520.845,00	99,50	668.015.078,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	104.150.000,00	104.087.514,00	99,94	328.217.640,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	104.150.000,00	104.087.514,00	99,94	328.217.640,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.900.000,00	3.900.000,00	100,00	0,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.900.000,00	3.900.000,00	100,00	0,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	18.378.992.263,00	17.807.821.867,00	96,89	14.331.518.528,00
5.2	BELANJA MODAL	16.114.561.990,00	15.772.151.467,00	97,88	18.830.661.480,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.010.666.500,00	1.003.387.500,00	99,28	307.508.280,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	361.381.000,00	360.998.000,00	99,89	24.860.000,00
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	361.381.000,00	360.998.000,00	99,89	24.860.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	415.120.000,00	411.070.000,00	99,02	119.770.280,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	345.500.000,00	343.825.000,00	99,52	71.000.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	69.620.000,00	67.245.000,00	96,59	48.770.280,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	50.000.000,00	49.500.000,00	99,00	0,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	50.000.000,00	49.500.000,00	99,00	0,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	0,00
5.2.02.08.04	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	7.400.000,00	7.400.000,00	100,00	55.000.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	55.000.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00	0,00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
5.2.02.15.04	Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	171.765.500,00	169.419.500,00	98,63	99.678.000,00
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	171.765.500,00	169.419.500,00	98,63	99.678.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	310.050.000,00	308.662.477,00	99,55	0,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	135.050.000,00	133.961.004,00	99,19	0,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	135.050.000,00	133.961.004,00	99,19	0,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	175.000.000,00	174.701.473,00	99,83	0,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	175.000.000,00	174.701.473,00	99,83	0,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	14.793.845.490,00	14.460.101.490,00	97,74	18.523.153.200,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	0,00	0,00	0,00	126.069.000,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	0,00	0,00	0,00	126.069.000,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	14.793.845.490,00	14.460.101.490,00	97,74	18.397.084.200,00
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	14.793.845.490,00	14.460.101.490,00	97,74	18.397.084.200,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	16.114.561.990,00	15.772.151.467,00	97,88	18.830.661.480,00
	JUMLAH BELANJA	34.493.554.253,00	33.579.973.334,00	97,35	33.162.180.008,00
	SURPLUS/DEFISIT	(33.764.921.253,00)	(32.756.983.334,00)	97,01	(31.472.300.568,00)



Kab. Bantul, 30 Januari 2025
Kepala Dinas Perhubungan
Singih Riyadi, S.E., M.M.
NIP. 197307211997031007



PEMERINTAHAN KAB. BANTUL
DINAS PERHUBUNGAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024

01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	728.633.000,00	822.990.000,00	112,95	1.689.879.440,00
4.1.02	Retribusi Daerah	721.133.000,00	822.990.000,00	114,12	1.681.015.700,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	278.960.000,00	303.605.000,00	108,83	1.176.163.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	442.173.000,00	519.385.000,00	117,46	504.852.700,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	7.500.000,00	0,00	0,00	8.863.740,00
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	7.500.000,00	0,00	0,00	8.863.740,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	728.633.000,00	822.990.000,00	112,95	1.689.879.440,00
	JUMLAH PENDAPATAN	728.633.000,00	822.990.000,00	112,95	1.689.879.440,00
5	BELANJA DAERAH	34.493.554.253,00	33.579.973.334,00	97,35	33.162.180.008,00
5.1	BELANJA OPERASI	18.378.992.263,00	17.807.821.867,00	96,89	14.331.518.528,00
5.1.01	Belanja Pegawai	6.562.266.289,00	6.065.002.965,00	92,42	5.722.620.775,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.465.691.289,00	3.168.211.421,00	91,42	3.074.654.637,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.964.000.000,00	2.769.591.544,00	93,44	2.524.006.138,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	132.575.000,00	127.200.000,00	95,95	123.960.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.816.725.974,00	11.742.818.902,00	99,37	8.608.897.753,00
5.1.02.01	Belanja Barang	5.997.263.973,00	5.957.956.222,00	99,34	3.525.150.295,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	3.833.650.650,00	3.807.402.307,00	99,32	3.508.256.197,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	1.877.761.351,00	1.869.472.859,00	99,56	1.247.273.621,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	104.150.000,00	104.087.514,00	99,94	328.217.640,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.900.000,00	3.900.000,00	100,00	0,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	18.378.992.263,00	17.807.821.867,00	96,89	14.331.518.528,00
5.2	BELANJA MODAL	16.114.561.990,00	15.772.151.467,00	97,88	18.830.661.480,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.010.666.500,00	1.003.387.500,00	99,28	307.508.280,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	361.381.000,00	360.998.000,00	99,89	24.860.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	415.120.000,00	411.070.000,00	99,02	119.770.280,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	50.000.000,00	49.500.000,00	99,00	0,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	7.400.000,00	7.400.000,00	100,00	55.000.000,00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	171.765.500,00	169.419.500,00	98,63	99.678.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	310.050.000,00	308.662.477,00	99,55	0,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	135.050.000,00	133.961.004,00	99,19	0,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	175.000.000,00	174.701.473,00	99,83	0,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	14.793.845.490,00	14.460.101.490,00	97,74	18.523.153.200,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	0,00	0,00	0,00	126.069.000,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	14.793.845.490,00	14.460.101.490,00	97,74	18.397.084.200,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	16.114.561.990,00	15.772.151.467,00	97,88	18.830.661.480,00
	JUMLAH BELANJA	34.493.554.253,00	33.579.973.334,00	97,35	33.162.180.008,00
	SURPLUS/DEFISIT	(33.764.921.253,00)	(32.756.983.334,00)	97,01	(31.472.300.568,00)



Kab. Bantul, 30 Januari 2025
Kepala Dinas Perhubungan
Singih Riyadi, S.E, M.M.
NIP. 197307211997031007



PEMERINTAHAN KAB. BANTUL
DINAS PERHUBUNGAN
LAPORAN OPERASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2024
1 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024



Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	2024	2023	Kenaikan / Penurunan	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
7	PENDAPATAN	822.990.000,00	1.728.719.440,00	(905.729.440,00)	(52,39)
7.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	822.990.000,00	1.728.719.440,00	(905.729.440,00)	(52,39)
7.1.02	Retribusi Daerah-LO	822.990.000,00	1.719.855.700,00	(896.865.700,00)	(52,15)
7.1.02.01	Retribusi Jasa Umum-LO	303.605.000,00	1.208.318.000,00	(904.713.000,00)	(74,87)
7.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha-LO	519.385.000,00	511.537.700,00	7.847.300,00	1,53
7.1.04	Lain-lain PAD yang Sah-LO	0,00	8.863.740,00	(8.863.740,00)	(100,00)
7.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO	0,00	8.863.740,00	(8.863.740,00)	(100,00)
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	822.990.000,00	1.728.719.440,00	(905.729.440,00)	(52,39)
	JUMLAH PENDAPATAN	822.990.000,00	1.728.719.440,00	(905.729.440,00)	(52,39)
8	BEBAN	24.689.118.777,98	15.489.052.274,67	9.200.066.503,31	59,40
8.1	BEBAN OPERASI	17.804.722.519,00	14.370.358.528,00	3.434.363.991,00	23,90
8.1.01	Beban Pegawai	6.065.002.965,00	5.722.620.775,00	342.382.190,00	5,98
8.1.01.01	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	3.168.211.421,00	3.074.654.637,00	93.556.784,00	3,04
8.1.01.02	Beban Tambahan Penghasilan ASN	2.769.591.544,00	2.524.006.138,00	245.585.406,00	9,73
8.1.01.03	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	127.200.000,00	123.960.000,00	3.240.000,00	2,61
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	11.739.719.554,00	8.608.897.753,00	3.130.821.801,00	36,37
8.1.02.01	Beban Barang	5.957.956.222,00	3.525.150.295,00	2.432.805.927,00	69,01
8.1.02.02	Beban Jasa	3.804.302.959,00	3.508.256.197,00	296.046.762,00	8,44
8.1.02.03	Beban Pemeliharaan	1.869.472.859,00	1.247.273.621,00	622.199.238,00	49,88
8.1.02.04	Beban Perjalanan Dinas	104.087.514,00	328.217.640,00	(224.130.126,00)	(68,29)
8.1.02.05	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00	100,00
8.1.07	Beban Penyisihan Piutang	0,00	38.840.000,00	(38.840.000,00)	(100,00)
8.1.07.02	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	0,00	38.840.000,00	(38.840.000,00)	(100,00)
	JUMLAH BEBAN OPERASI	17.804.722.519,00	14.370.358.528,00	3.434.363.991,00	23,90
8.1.08	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	6.884.396.258,98	1.118.693.746,67	5.765.702.512,31	515,40
8.1.08.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	2.282.372.327,29	828.466.066,70	1.453.906.260,59	175,49
8.1.08.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	300.153.679,94	115.171.557,05	184.982.122,89	160,61
8.1.08.03	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	4.096.756.873,75	0,00	4.096.756.873,75	100,00
8.1.08.06	Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	205.113.378,00	175.056.122,92	30.057.255,08	17,17
	JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	6.884.396.258,98	1.118.693.746,67	5.765.702.512,31	515,40
	JUMLAH BEBAN	24.689.118.777,98	15.489.052.274,67	9.200.066.503,31	59,40
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(23.866.128.777,98)	(13.760.332.834,67)	(10.105.795.943,31)	73,44

Kab. Bantul, 31 Januari 2025
Kepala Dinas Perhubungan

Singgih Riyadi, S.E., M.M.
NIP.197307211997031007



PEMERINTAH KAB. BANTUL
DINAS PERHUBUNGAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
1 JANUARI 2024 SAMPAI 31 DESEMBER 2024



(Dalam Rupiah)

URAIAN	2024	2023
EKUITAS AWAL	143.436.192.153,39	128.212.457.617,39
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(23.866.128.777,98)	(13.760.332.834,67)
RK PPKD	32.756.983.334,00	28.984.067.370,67
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	956.977.917,00	0,00
Alat Tulis Kantor	(47.313.000,00)	0,00
Kertas dan Cover	98.300,00	0,00
Bahan Komputer	3.175.000,00	0,00
Perabot Kantor	368.400,00	0,00
Alat Listrik	1.000.254.217,00	0,00
Perlengkapan Dinas	0,00	0,00
Suvenir/Cendera Mata	250.000,00	0,00
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	145.000,00	0,00
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
LAIN-LAIN	3.009.826.702,68	0,00
Beban Dibayar Dimuka	2.070.000,00	0,00
Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.731.499,98	0,00
Alat Bengkel Bermesin Lainnya	49.500.000,00	0,00
Peralatan Tukang Besi	1.318.000,00	0,00
Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya	338.575.000,00	0,00
Alat Kalibrasi	16.370.000,00	0,00
Alat Ukur Lain-Lain	(14.498.000,00)	0,00
Alat Penguji Kendaraan Bermotor	(346.500.000,00)	0,00
Mesin Hitung/Mesin Jumlah	(19.800.000,00)	0,00
Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	7.400.000,00	0,00
Alat Kantor Lainnya	(340.075.000,00)	0,00
Mebel	(164.687.000,00)	0,00
Alat Pembersih	8.468.000,00	0,00
Alat Dapur	2.347.000,00	0,00
Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	323.035.500,00	0,00
Peralatan Cetak	(49.500.000,00)	0,00
Alat Komunikasi Telephone	0,01	0,00
System/Power Supply	(5.000.000,00)	0,00
Alsus Fotografi Kepolisian	2.400.000,00	0,00
Personal Computer	9.400.000,00	0,00
Peralatan Personal Computer	14.070.000,00	0,00
Alat Ukur Peralatan FASLEKTRIK	13.180.000,00	0,00
Rambu Bersuar	(109.088.999,99)	0,00
Rambu Tidak Bersuar	357.622.733,32	0,00
Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	(169.419.500,00)	0,00
Bangunan Gedung Kantor	1.306.863.401,00	0,00
Bangunan Gedung Tempat Ibadah	(79.725.000,00)	0,00
Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	113.818.999,00	0,00
Bangunan Terbuka	175.326.473,00	0,00
Bangunan Fasilitas Umum	18.634.000,00	0,00
Taman	7.852.000,00	0,00
Pagar	(174.701.473,00)	0,00
Bangunan Pengaman Irigasi	105.574.000,00	0,00
Jaringan Transmisi	0,16	0,00
Jaringan Listrik Lainnya	636.756.816,85	0,00
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	(1.731.500,55)	0,00
Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Service	35.948.000,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Service	(35.948.000,00)	0,00
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah	19.800.000,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	(4.440.000,00)	0,00
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel	164.687.000,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	(0,98)	0,00
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	(61.170.500,00)	0,00
Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	(3.600.000,00)	0,00
Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar	109.088.999,73	0,00
Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar	304.872.312,74	0,00
Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	(0,18)	0,00

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2024	2023
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	66.229.352,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	14.350.500,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	(0,41)	0,00
Kajian	174.074.020,00	0,00
Aset Tidak Berwujud Lainnya	188.348.070,00	0,00
EKUITAS AKHIR	156.293.851.329,09	143.436.192.153,39

Kab. Bantul, 31 Januari 2025
Kepala Dinas Perhubungan

Singih Riyadi, S.E., M.M.
NIP. 197307211997031007